

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Politik Internasional merupakan salah satu kajian penting dalam studi ilmu hubungan internasional. Kajian tentang ekonomi politik internasional adalah salah satu produk adanya globalisasi, di mana akar globalisasi berasal dari interaksi dalam perdagangan global dan kegiatan investasi korporasi yang ditopang oleh kemajuan dari teknologi informasi dan berdampak pada munculnya gejala-gejala sosial.

Globalisasi dianggap oleh beberapa kalangan sebagai arena baru persaingan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Hal ini dilihat dari globalisasi yang menimpa negara sedang berkembang terus mengalami penurunan, karena negara maju hanya mengupayakan terbukanya akses pasar di negara sedang berkembang. Terbukanya akses ini berujung pada kerugian, yaitu negara sedang berkembang yang dituntut untuk menerapkan sistem *invisible hand* dan hilangnya peran pemerintah untuk intervensi terhadap pasar.

Selain itu, globalisasi mengakibatkan adanya jurang pemisah antara negara maju dan negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti mineral, minyak bumi, rempah-rempah, dan sebagainya. Besarnya potensi Indonesia akan sumber daya alam selayaknya mampu membuat Indonesia menjadi salah satu negara maju. Namun sebaliknya, sebagian besar masyarakatnya justru mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi yang berdampak pada meningkatnya angka

kemiskinan. Keterpurukan ekonomi Indonesia pada dasarnya terjadi karena kegagalan dalam mengelola dan memanfaatkan momentum globalisasi, baik dalam hal kemampuan dan kesiapan mencakup negara maupun masyarakat. Hal ini berujung pada keadaan Indonesia merugi karena arus globalisasi yang cepat melalui hadirnya investasi asing, perusahaan multinasional dan transnasional serta berbagai hal yang mendukung percepatan globalisasi. Inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi jauh dibawah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain.

Kawasan paling miskin di dunia terbanyak terjadi di benua Afrika. Benua Afrika adalah salah satu benua yang kerap mengalami bencana kelaparan, serta menghadapi konflik berkepanjangan baik berupa pemberontakan maupun perang saudara. Sebuah studi dari *World Institute* di *United Nations University* melaporkan adanya ketimpangan kondisi negara-negara dikawasan Afrika dibandingkan belahan bumi lainnya. Sebanyak 1 persen orang terkaya dunia menguasai 40 persen aset global, bahkan 10 persen orang terkaya dunia menguasai 85 persen aset dunia.¹

Perkembangan ekonomi politik internasional melalui globalisasi sejatinya diharapkan mampu membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti memicu pertumbuhan ekonomi, perubahan dalam struktur produksi menjadi yang lebih efisien, meningkatnya taraf hidup masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan di negara maju maupun di negara sedang berkembang.

¹<http://bisnis.news.viva.co.id> dalam "Daftar negara paling miskin di dunia". (diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 19.25 WIB)

Salah satu contoh dari keberhasilan globalisasi dapat dilihat dari fenomena kebangkitan ekonomi China, India, Brazil dan Korea Selatan. Ketiga negara ini berhasil membawa negaranya pada posisi di atas rata-rata negara sedang berkembang lain berkat adanya globalisasi. Namun kenyataannya, globalisasi tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara, tetapi juga memberi dampak negatif seperti munculnya fenomena *failed state* yang terjadi di Somalia, Zimbabwe, dan Timor Leste. Munculnya *failed state* telah menunjukkan bahwa globalisasi juga memberi dampak negatif berupa meluasnya kemiskinan dan ketimpangan antara negara maju dan negara sedang berkembang. *Failed state* sebagai kegagalan globalisasi memberikan masyarakat pilihan bahwasannya pengetahuan yang kuat dari masyarakat dan terutama negara adalah kunci utama dalam menghadapi globalisasi.

Pada tingkat negara, apabila melihat kasus Argentina tahun 1980-1982 negara ini mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis perbankan dan hutang luar negeri yang sudah limit, yaitu biaya rekonstruksi perbankan mencapai 5,3 persen dari *Product Domestic Bruto* (PDB). Hingga pada tahun 1989 inflasi mencapai 3080 persen . Pada tahun 1991, Argentina melakukan penyesuaian struktural sesuai dengan prinsip *International Monetary Found* (IMF) dan menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Washington Consensus*. Perekonomian Argentina pada awalnya berjalan cukup baik, namun pada 2002 ekonomi negara ini mengalami kehancuran total dimana PDB turun sampai 12 persen, pengangguran terbuka naik diatas 20 persen, obligasi membengkak, nilai

tukar sampai berada pada sepertiganya, aset masyarakat dibekukan, hingga berujung pada kerusuhan sosial.²

Dalam kasus Argentina, kemiskinan dan ketimpangan bukan terjadi karena tidak memiliki sumber daya, tetapi disebabkan oleh langkah pemerintah yang salah dalam hal mengambil kebijakan yakni sikap pemerintah Argentina untuk ikut dalam strategi lembaga ekonomi politik internasional seperti, IMF, WTO, dan Bank Dunia.

Fenomena tersebut telah menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi yang diserukan oleh lembaga ekonomi politik internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia serta korporasi multinasional merupakan sebuah permainan yang tidak seimbang, dilihat dari sisi kekuatan yang dimiliki dalam aspek industri, teknologi, finansial dan kemampuan sumber daya manusia yang jauh berbeda. negara-negara miskin dituntut untuk berhadapan dengan pasar negara-negara maju dengan sistem pasar yang bebas dan tanpa ada sedikitpun keterlibatan pemerintah di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya lembaga-lembaga ini hanya menciptakan kesenjangan dan ketimpangan yang semakin lebar antara kedua belah pihak.

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam skala global yang mampu membawa perubahan dalam aspek ekonomi, teknologi, budaya, militer, dan lain-lain. Oleh karenanya, pengaruh yang ditimbulkan pun beragam

² Joseph Stiglitz, 2006. *Making Globalization Work. Menyasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*. Bandung : Mizan. hal 18-19

baik positif maupun negatif.³ Menurut David Held, globalisasi adalah suatu zaman yang baru dimana dalam hal ini tujuan perubahan menuju ke bidang ekonomi. Held kemudian membagi tiga kubu dalam globalisasi yaitu *Hyperglobalist*, *Sceptic-globalist*, dan *Transformasionalist*.⁴

Hyperglobalist merupakan kubu yang mendukung globalisasi dan berasumsi bahwa Globalisasi memberikan ruang yang terbuka bagi semua negara untuk dapat mengambil keuntungan dari globalisasi. Salah satu tokoh dari *hyperglobalist* yaitu Kenichi Ohmae. Kubu yang kedua adalah *sceptic-globalist*, kubu ini merupakan penentang dari globalisasi. *Sceptic-globalist* percaya bahwa globalisasi hanyalah mitos dan telah melahirkan dominasi baru terhadap negara-negara miskin. Tokoh dari *sceptic-globalist* yaitu Paul Hirst dan Grahame Thompson. Dalam hal ini penulis akan menganalisa lebih dalam terkait kubu yang ketiga yaitu *transformasionalist*. *Transformasionalist* adalah kubu atau paradigma yang menjadi penengah antara dua paradigma sebelumnya yaitu *hyperglobalists* dan *sceptic-globalist*. *Transformasionalist* menyebutkan bahwa globalisasi adalah kekuatan utama dibalik perubahan sosial, ekonomi dan politik yang tengah menentukan kembali masyarakat-masyarakat moderen dan tatanan dunia. Mengenai peran negara, kelompok *transformasionalist* berpendapat bahwa globalisasi yang tengah berlangsung saat ini sedang mengatur kembali kekuasaan, fungsi, dan otoritas pemerintahan nasional. Peran negara harus disejajarkan dalam berbagai tingkat dengan perluasan yuridiksi lembaga pengaturan internasional

³ <http://triscamiaa-fisip12.web.unair.ac.id> dalam "Pengantar globalisasi: Debat besar dalam globalisasi" (diakses pada 25 Mei 2015 pukul 20.00 WIB)

⁴ David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton, *Global Transformations, Politics, Economics, and Culture*. Stanford University Press, USA, 1999, Hal 2.

sebagai mana kewajiban dari hukum internasional. sehingga peran negara setara dengan lembaga internasional maupun perusahaan transnasional. Oleh karenanya Kaum *transformasionalist* percaya bahwa globalisasi akan mendefinisikan ulang peran negara sebagai akibat munculnya hireraki baru dalam hubungan internasional.⁵

Dalam istilah Sri Edi Swasono, *transformasionalist* tergolong kedalam kelompok yang lebih kritis dan objektif dalam memandang globalisasi. Mereka melihat kebaikan dan keburukan globalisasi secara objektif, dan secara kritis mengungkapkan globalisasi sebagai sebuah fenomena yang mengecewakan. Mereka melihat globalisasi penuh dengan janji-janji, tetapi isinya kosong. Kelompok ini berpendapat bahwa globalisasi memiliki potensi yang amat besar, namun mereka juga sangsi apakah janji-janji globalisasi tersebut akan terwujud. Pendeknya, kelompok ini berusaha memperbaiki dan mengkritisi bukan menentang.⁶

Martin Wolf dalam karyanya *Why Globalization Work*, menyebutkan bahwa dari berbagai pendapat yang bisa dilihat bahwa kaum yang menolak atau mengecam globalisasi berada dalam spektrum yang luas, dari kaum aktivis garis keras yang masih menggunakan argumen anti kapitalisme klasik hingga para ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz yang ingin meningkatkan kinerja globalisasi

⁵ Joseph E Stiglitz and Andrew Charlton, *Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hal 57-58

⁶ Sri Edi Swasono dalam Deliarnov, *Ekonomi dan Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, hal. 202

dan kapitalisme untuk lebih mencapai tujuan sosial seperti halnya stabilitas dan pemerataan.⁷

Salah satu produk dari adanya globalisasi yaitu berdirinya institusi ekonomi politik seperti WTO. WTO (*World Trade Organization*) merupakan institusi perdagangan global yang bertujuan mengatur jalannya perdagangan dunia agar mampu membuat perdagangan bebas dalam hal ini yang berdampak secara positif tidak hanya terhadap negara maju tetapi juga negara sedang berkembang. WTO secara resmi mulai beroperasi pada 1 Januari 1995 dan secara institusional WTO sebagai kelanjutan dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang telah dibentuk sejak tahun 1947, lahirnya WTO dari GATT merujuk pada putaran perundingan ke-8 disebut dengan Putaran Uruguay. Putaran yang dimulai pada tahun 1986 merujuk pada kesepakatan yang diambil di Uruguay, dan berakhir pada Maret 1994 di Marrakesh, Maroko. Pada saat itulah organisasi GATT diubah namanya menjadi WTO. Institusi ini mengatur tiga bidang meliputi, perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*) dan HAKI terkait perdagangan (*trade related intellectual property right*).

Sejak mulai berdiri, WTO telah melakukan sebanyak tujuh kali penyelenggaraan konferensi tingkat menteri yaitu, di Singapura, Swiss, Amerika Serikat, Qatar, Meksiko, Hong Kong dan Jenewa. Konferensi ini dihadiri oleh seluruh anggota yang diwakili oleh menteri perdagangan masing-masing negara

⁷ Martin wolf, kata pengantar "Dari Kapitalisme Ke Globalisasi" dalam *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Mizan, 2007 p.xii

anggota.⁸ Dari sisi keanggotaan, negara anggota WTO terdiri atas negara maju dan negara sedang berkembang. Dalam hal ini, negara sedang berkembang turut andil dalam WTO dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangannya yang merupakan sarana utama dalam upaya pembangunan.⁹

Salah satu syarat dalam keanggotaan institusi WTO adalah pengimplementasian dari sistem perdagangan bebas yang tertuang dalam *Washington Consensus*, artinya pasar secara bebas berinteraksi tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Prinsip dan dasar pembentukan WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas “*Most Favoured Nations Principle* (MFN)” dan perlakuan non diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatan. Terbukanya pasar domestik suatu negara terhadap perdagangan internasional, dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.¹⁰

⁸ <http://wtoo.tumblr.com> dalam “konferensi menteri” (diakses pada 30 September 2015 pukul 20.21 WIB)

⁹ World Trade Organization, “*Understanding the WTO*”, *World Trade Organization Information and External Relations Division*, 2010, hlm. 93.

¹⁰ Warnita Amelia, *Penerapan Prinsip Preferensi bagi Negara Berkembang dalam Perdagangan Bebas pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Pemanfaatannya oleh Indonesia*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2012.

Pada tahun 2001 diadakan Konferensi Tingkat Menteri di Doha, perundingan yang disebut *Doha Development Agenda*. Perundingan ini bertujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang memperhatikan dimensi ekonomi, perdagangan serta dimensi pembangunan. Hal ini nantinya akan memberikan kesempatan kepada negara-negara sedang berkembang untuk dapat memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan ekonominya. Namun agenda ini tidak dapat dijalankan karena dalam putaran ini negara-negara anggota WTO tidak berhasil menyepakati agenda tersebut.

Ketimpangan yang terjadi dalam globalisasi khususnya perdagangan internasional dalam WTO mengundang kritik dari salah satu tokoh *transformasionalist* yaitu Joseph E. Stiglitz. Stiglitz pada awalnya merupakan seorang tokoh *hyperglobalist* saat dirinya menjadi salah satu penasihat ekonomi Presiden Clinton. Stiglitz kemudian memutuskan untuk bergabung dalam Bank Dunia untuk melihat permasalahan yang ada, serta sebagai upaya mengkaji lebih dalam terkait dukungan bagi negara sedang berkembang.¹¹ Kemudian Stiglitz mulai merubah jalurnya menjadi seorang *transformasionalist* yang memberikan pandangan tentang beberapa isu penting dalam perekonomian global dan salah satunya adalah WTO. Berdasarkan pengalaman Stiglitz selama menjadi praktisi dalam melihat fenomena perekonomian global, khususnya berbagai kebijakan-kebijakan dalam WTO telah mendasari penulis untuk menggunakan pemikiran Stiglitz dalam menganalisa kajian ini.

¹¹ Joseph E Stiglitz, *Op cit.*, hal 31

Penulis beranggapan bahwa pemikiran Stiglitz sangatlah rasional. Stiglitz tidak menyanggah dan tidak menyalahkan seutuhnya terkait dengan isu globalisasi khususnya WTO. Stiglitz sepenuhnya setuju dengan adanya WTO sebagai institusi yang mengatur perdagangan internasional. Hanya saja Stiglitz beranggapan diperlukan sebuah perubahan didalam struktur WTO.

Stiglitz menyebutkan bahwa WTO telah melahirkan sebuah sistem perdagangan bebas (*Free Trade*), di mana keleluasaan negara untuk membuka pasar selebar-lebarnya bagi aliran barang dan jasa. Artinya sistem ini kemudian dituntut untuk memberikan kontribusi bagi negara miskin berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Stiglitz, pasar bebas gagal menciptakan kesejahteraan karena perjanjian perdagangan internasional yang tidak adil. Ketidakadilan tersebut dilihat dari kebijakan negara maju yang diizinkan mengenakan pajak pada barang-barang produksi negara sedang berkembang yang besarnya empat kali lipat dari barang-barang yang diproduksi oleh industri negara maju. Di sisi lain, negara-negara sedang berkembang dipaksa untuk menghilangkan subsidi dalam rangka membantu lahirnya industri-industri baru, sedangkan negara industri maju justru diperbolehkan melanjutkan subsidi dibidang pertanian, sehingga berdampak pada jatuhnya harga komoditas pertanian dan melemahnya standar hidup di negara sedang berkembang.¹²

Berbagai fakta yang menunjukkan bahwa kebijakan WTO belum sepenuhnya membawa dampak positif bagi seluruh anggotanya dapat di lihat dari adanya kebijakan liberalisasi perdagangan yang terdapat dalam laporan UNCTAD

¹² Stiglitz. *Ibid.*, hal 64-65.

(*United Nations Conference on Trade and Development*) tahun 1999. Laporan ini berfokus pada perilaku dan keseimbangan antara impor dan ekspor yang menemukan bahwa liberalisasi perdagangan yang cepat telah memberikan kontribusi terhadap pelebaran defisit perdagangan di negara-negara berkembang pada umumnya. Laporan ini menemukan bahwa liberalisasi perdagangan yang cepat telah menyebabkan peningkatan tajam dalam impor, namun dari segi ekspor gagal untuk mengikutinya. China misalnya, defisit perdagangan rata-rata pada tahun 1990 cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 1970-an dari tiga poin presentase PDB. Sementara tingkat pertumbuhannya rata-rata lebih rendah sebanyak dua poin.¹³

Hadirnya WTO sebagai institusi perdagangan internasional tidak hanya mendapat kritik dari para ekonom dunia layaknya Stiglitz, tetapi juga berimbas pada munculnya gerakan-gerakan yang tergabung dalam *Anti-Globalization Movement*. Peristiwa yang terjadi di Seattle tahun 1999 merupakan kerusuhan gerakan anti globalisasi yang terbesar dan diikuti oleh 5000 demonstran yang mengkritik cara kerja WTO dan sebagai bentuk nyata ketidakpuasan masyarakat atas institusi tersebut.

Stiglitz memaparkan bahwa WTO telah menciptakan kesenjangan global antara negara maju dan negara sedang berkembang. Hal ini tercermin dalam upaya negara-negara maju yang terus mendorong, bahkan memaksa agar negara sedang berkembang membuka pasarnya bagi produk negara maju. Namun dilain pihak,

¹³ <http://www.twn.my/title/davos2-cn.htm> (diakses pada 24 September 2015 pukul 20.29 WIB)

negara maju justru menutup rapat pasarnya sehingga produk negara sedang berkembang tidak dapat masuk. Khususnya dalam produk pertanian dan tekstil.¹⁴

Amerika misalnya yang mendorong liberalisasi jasa keuangan (*financial services*), tetapi pada saat yang sama menentang liberalisasi sektor jasa pada umumnya, termasuk jasa konstruksi dan maritim karena negara sedang berkembang memiliki posisi kuat dalam sektor-sektor ini. Stiglitz melihat hal ini sebagai bentuk kurangnya keberpihakan WTO terhadap negara sedang berkembang, sehingga bukan saja tidak memperoleh keuntungan secara wajar, melainkan situasi negara sedang berkembang yang semakin sulit. Afrika sub-Sahara misalnya yang perdagangannya semakin menurun ketika perundingan perdagangan WTO ditandatangani dan dilaksanakan.¹⁵

Stiglitz juga mengingatkan bahwa terkadang Amerika Serikat menampakan hal yang tidak wajar, misalnya ketika membahas keanggotaan China di WTO. Juru runding utama Amerika berpendapat pada dasarnya China adalah negara maju bukan negara sedang berkembang. Padahal hanya negara berkembang yang diperbolehkan memperpanjang transisi, termasuk memperpanjang subsidi negara dan berbagai penundaan atas aturan WTO yang tidak ketat. Karena China adalah negara maju versi Amerika, maka China tidak boleh mendapatkan kelonggaran-kelonggaran aturan dalam WTO.¹⁶

¹⁴ Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008. Hal 47-50

¹⁵ Amin Rais, *Ibid.*, hal 47-49

¹⁶ *Ibid.*

Gerald Houseman dalam *The Vulnerable Economic Mainstream : Joseph Stiglitz and The Critique on Free Market Analysis* juga memaparkan bahwa pasar bebas yang bernaung dalam sistem 'tangan tak terlihat' (*invisible hand*) telah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan informasi posisi salah satu pihak diposisi yang unggul dalam hal tawar-menawar antara negara maju dan negara sedang berkembang yang nantinya akan berdampak pada kesenjangan antara kedua belah pihak khususnya bagi negara sedang berkembang.¹⁷

Dalam hal ini penulis akan memaparkan alasan dari munculnya kritik-kritik Joseph E. Stiglitz terhadap perdagangan bebas dilihat dari sisi WTO selaku institusi perdagangan internasional. Rencana kajian ini penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul '**Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz**'. Kajian ini akan menjadi penyelesaian tugas sekaligus prasyarat studi Sarjana strata 1 (satu) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

"Mengapa Joseph E. Stiglitz berpandangan untuk melakukan reformasi struktur perdagangan internasional khususnya WTO?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui lebih lanjut mengenai reformasi struktur perdagangan internasional yang adil baik bagi negara sedang berkembang maupun negara maju dalam sudut pandang Joseph E. Stiglitz.

¹⁷ Gerald Houseman dalam *The Vulnerable Economic Mainstream : Joseph Stiglitz and The Critique on Free Market Analysis*. Challenge, vol,no.2 Maret/April 2006, pp 52-62

D. Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel serta hubungan antar variabel berdasarkan pada konsep atau definisi masing-masing. Teori berperan penting dalam sebuah penelitian karena unsur-unsur dalam teori tersebut akan menerangkan fenomena-fenomena sosial atau gejala-gejala alami yang akan dianalisa. Menurut Mochtar Mas'ood teori merupakan upaya untuk memberi makna pada sebuah fenomena.¹⁸

Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis akan menjelaskan salah satu konsep globalisasi yaitu *Transformasionalist*. Konsep tersebut akan memudahkan penulis dalam memahami secara konprehensif tentang upaya reformasi struktur perdagangan internasional khususnya WTO serta kaitannya dengan peran negara. Dengan teori tersebut diharapkan dalam karya ilmiah ini terdapat suatu pemahaman yang memadai untuk memudahkan pengkajian terhadap institusi perdagangan internasional yaitu WTO di era globalisasi.

Konsep Globalisasi : *Transformasionalist*

Globalisasi sejatinya merupakan lanjutan perkembangan ekspansi ekonomi dan imperium kolonial eropa sejak abad ke-16. Globalisasi telah melahirkan apa yang disebut sebagai perekonomian global. Perekonomian global adalah suatu keadaan dimana segenap aspek perekonomian pasokan dan permintaan bahan mentah, informasi dan transportasi tenaga kerja, keuangan, distribusi, serta

¹⁸ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES. 1990 hal.184-185

kegiatan-kegiatan pemasaran menyatu atau terintegrasi dan kian terjalin dalam saling ketergantungan yang berskala dunia.¹⁹

Untuk memahami globalisasi setidaknya ada tiga kubu globalisasi yang dikelompokan oleh David Held yaitu *Hyperglobalist*, *Sceptic-globalist*, dan *Transformasionalist*. *Hyperglobalist* melihat bahwa fenomena globalisasi sebagai era baru dimana manusia diseluruh dunia akan terhubung dan saling terkait dalam pasar global. berpendapat bahwa globalisasi ekonomi membawa pada apa yang disebut 'denasionalisasi' ekonomi melalui pembentukan jaringan transnasional produksi, perdagangan dan keuangan. Seperti pandangan globalisasi umumnya hak logika ekonomi dan neoliberal mengupayakan munculnya suatu pasar global tunggal dengan prinsip persaingan global sebagai pertanda kemajuan manusia.²⁰ Salah satu penganut paradigma ini adalah Kenichi Ohmae.²¹

Pendekatan *Skeptic-globalist* memandang bahwa globalisasi adalah sebuah mitos dimana selama ini saling ketergantungan ekonomi secara historis belum pernah terjadi sebelumnya, oleh karena itu skeptis menyimpulkan bahwa tingkat 'globalisasi' kontemporer sepenuhnya berlebihan. Skeptis menyiratkan perekonomian dunia yang terintegrasi dengan sempurna dimana hukum satu harga berlaku, yang menegaskan telah terjadi dominasi dalam perekonomian nasional.²²

¹⁹ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, (edisi kedua), jilid 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal 413.

²⁰ Held, *Op cit.*, hal 4

²¹ Buku yang ditulis Kenichi Ohmae "*The End of Nation State : The Rise of Regional Economies*" dianggap sebagai manifesto dari kaum Hiperglobalis. Kenichi Ohmae adalah seorang ahli manajemen Jepang yang melontarkan gagasan kemakmuran menurut hukum *supply and demand*, membiarkan barang dan modal bergerak secara bebas diseluruh dunia tanpa campur tangan negara.

²² Held, *Op cit.*, hal..2

Terakhir, yaitu paradigma *transformasionalist*. Kelompok ini disebut sebagai kelompok tengah antara dua paradigma sebelumnya. Penganut aliran ini diantaranya adalah David Held dan Joseph Stiglitz. Menurut para pendukung *transformasionalist* proses kontemporer globalisasi secara historis belum pernah terjadi sebelumnya sehingga pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia yang harus menyesuaikan diri dengan sebuah dunia dimana tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara urusan internasional dan domestik, eksternal dan internal. Dalam hal ini, globalisasi dipahami sebagai kekuatan transformatif yang kuat yang bertanggung jawab untuk '*massive shake-out*' dari masyarakat, ekonomi, lembaga pemerintahan dan tatanan dunia. Namun '*shake -out*' ini masih belum jelas, karena globalisasi di pahami sebagai proses sejarah dasarnya kontingen penuh dengan kontradiksi/ketidakpastian. *Transformationalist* tidak membuat klaim tentang lintasan masa globalisasi, juga tidak berusaha untuk mengevaluasi dalam kaitannya secara tunggal, tetapi *transformasionalist* menginginkan tipe ideal dunia, baik pasar global maupun peradaban global.²³

Secara fundamental globalisasi dianggap memiliki kelemahan mendasar, seperti yang dikemukakan oleh Paul Hirst dan Graham Thompson. Pertama tidak ada model ekonomi global baru yang telah diterima secara umum dan jelas-jelas berbeda dari ekonomi sebelumnya; Kedua, karena tidak ada model yang jelas sebagai patokan untuk mengukur arah perkembangan ekonomi dunia maka ada tendensi untuk menyebut begitu saja contoh-contoh dari sektor dan proses yang telah mendunia, seolah-olah contoh didominasi oleh kekuatan pasar yang otonom;

²³ Held, *ibid*

Ketiga, tidak ada penyelidikan sejarah, yaitu ada kecenderungan untuk melukiskan perubahan-perubahan mutakhir sebagai sesuatu yang unik, tanpa preseden di masa lalu dan dianggap pasti akan terus berlanjut dimasa depan.²⁴

Ancaman lain dari globalisasi juga dipaparkan oleh Anthony Giddens. Menurut Giddens globalisasi yang sedang berjalan membuat dunia menuju pada suatu titik ketidakpastian (*Manufactured uncertainty*).²⁵ Masa ini disebabkan oleh keadaan manusia dan teknologi yang diciptakan. Seperti halnya pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, peningkatan massa air laut, limbah industri dan sebagainya. Keadaan selanjutnya pasca *Manufactured uncertainty* adalah dunia mengalami apa yang disebut sebagai *High Consequence risk*.²⁶ Ini merupakan sebuah kondisi masyarakat dihadapkan pada sebuah fenomena modernitas dan globalisasi yang berakibat pada konsekuensi tinggi. Sebagai contohnya krisis yang dialami oleh negara-negara Asia pada tahun 1997-1998.

Stiglitz memberikan penilaian yang objektif dan kritis terhadap fenomena globalisasi. Stiglitz menyatakan bahwa globalisasi adalah penghapusan hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas dan upaya integrasi ekonomi yang semakin kuat sehingga menimbulkan potensi kemakmuran bagi setiap individu, terutama orang-orang miskin. Namun pengimplematasian globalisasi yang tidak baik lalu memunculkan kesadaran bahwa globalisasi harus dipikirkan secara radikal terkait peluang globalisasi tersebut. Karena Stiglitz memandang bahwa globalisasi tidak

²⁴ Paul Hirts dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos: Sebuah Kesangsian Terhadap Konsep Globalisasi Ekonomi Dunia dan Kemungkinan Aturan Mainnya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. pp,2-3

²⁵ Anthony Giddens, *Beyond left and right. Tarian Ideologi Alternatif di atas pusaran sosialisme dan kapitalisme*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2003, P.17

²⁶ Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002 p.x

hanya memberikan manfaat positif bagi jutaan orang tetapi juga melahirkan kesenjangan ekonomi antara orang miskin dan orang kaya.²⁷

Pada kasus WTO, Stiglitz melihat realitas adanya ketidakadilan dalam proses pengambilan kebijakan didalam institusi tersebut, hal ini diimplementasikan melalui aturan-aturan non-diskriminasi yang ditetapkan oleh WTO. Dari konsep *transformasionalist* dapat dilihat bahwa dibutuhkan sebuah institusi perdagangan internasional yang mengambil kebijakan secara adil dan demokratis untuk menciptakan sebuah arus perdagangan yang tidak hanya berpihak pada negara maju tetapi juga negara sedang berkembang. Perdagangan bebas yang diusung oleh WTO merupakan produk dari *Washington Concensus* artinya setiap Negara yang menjadi anggota WTO diwajibkan untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang ada didalamnya. Salah satunya keleluasaan barang dan jasa untuk masuk ke dalam suatu negara tanpa adanya hambatan perdagangan. Perdagangan bebas ditopang oleh sebuah asumsi akan mekanisme pasar yang disebut *invisible hand* sebagai acuan bahwa pemerintah domestik suatu negara dilarang untuk memproteksi perdagangannya atau ikut campur. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa pasar memiliki mekanisme yang secara natural nantinya akan memberi manfaat kepada semua yang berada di dalamnya. Namun *transformasionalist* melihat bahwa perdagangan bebas dengan mekanisme 'tangan tak terlihat' hanya menguntungkan satu pihak yaitu negara maju sedangkan negara sedang berkembang terus dirugikan.

²⁷ Joseph E Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, New York: WW Norton&company, 2003,pp ix-x

Kritik-kritik atas institusi WTO tersebut dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman Stiglitz dalam melihat fenomena deskriminasi WTO atas negara-negara sedang berkembang. Karena itu, penulis menggunakan konsep globalisasi yaitu *transformasionalist* sebagai alat untuk menganalisa reformasi perdagangan internasional khususnya institusi WTO dalam sudut pandang Joseph E. Stiglitz.

E. Hipotesis

Dalam pandangan Joseph E. Stiglitz rezim perdagangan internasional seperti WTO sangat mendesak untuk dilakukan reformasi karena dua hal, yaitu:

Pertama, menurut pandangan Stiglitz WTO tidak demokratis khususnya dalam mengakomodasi kepentingan negara sedang berkembang.

Kedua, pengalaman Stiglitz sebagai sosok yang berpengaruh dalam sistem institusi ekonomi internasional seperti Bank Dunia membuatnya amat paham tentang struktur dan mekanisme kerja rezim ekonomi internasional. Hal ini mendorongnya untuk menjadi seorang *transformasionalist-globalis* dan memandang perlunya reformasi struktur perdagangan internasional sebagai upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif yang diperoleh melalui data sekunder yaitu studi literatur, yang diutamakan berupa data tertulis bentuk cetak seperti buku, jurnal, kliping dan diktat kuliah. Disamping itu penulis juga berusaha melengkapinya dengan menyertakan data tertulis bentuk

elektronik seperti e-book dan beberapa data dari sumber internet dan literature lainnya yang dianggap memiliki relevansi terkait dengan tulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritis, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Pada bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran transformasi kerjasama perdagangan internasional mulai dari perkembangan awal perdagangan internasional sampai terbentuknya lembaga perdagangan internasional GATT hingga WTO.
- Bab III Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang struktur dan analisis terhadap Impikasi WTO serta beberapa kebijakan WTO yang dianggap sebagai instrumen hegemoni perdagangan negara maju terhadap negara sedang berkembang.
- Bab IV Bab ini berisi tentang tawaran Joseph E.Stiglitz sebagai seorang *transformasionalist-globalis* terhadap reformasi struktur perdagangan internasional dalam WTO.
- Bab V Pada bab ini berisi penutup dan kesimpulan, yang berisi ringkasan secara keseluruhan tentang penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.